



B A B - II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

A. Visi dan Misi

Visi merupakan hasil refleksi dan proyeksi tentang arah yang hendak dituju Pemerintah Kabupaten Berau dalam menjalankan amanat publik, yang digali dari nilai-nilai luhur yang mampu menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki menuju apa yang ingin diwujudkan, Pemerintah Kabupaten Berau menetapkan suatu Visi :

“Mewujudkan Kabupaten Berau Sebagai Daerah Unggulan Dibidang Agribisnis dan Tujuan Wisata, Serta Energi Terkemuka Menuju Masyarakat Sejahtera”.

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Agribisnis:

Adalah aktivitas perencanaan dan pendayagunaan potensi pertanian dalam arti luas, yaitu pertanian, kehutanan, perikanan dan peternakan serta kelautan dengan kekayaan mega bio diversitynya merupakan potensi strategis yang dijadikan sebagai dasar landasan dan acuan bagi kebijakan pembangunan ekonomi di bidang industri serta ekowisata pada tahun 2011-2015.

2. Wisata:

Adalah aktivitas perencanaan dan pendayagunaan kekayaan sumber daya alam pesisir, laut maupun darat baik yang berupa biofisik, maupun sosial budaya sebagai aset wisata yang bernilai tambah ekonomi, ilmu pengetahuan dan budaya secara berkelanjutan.

3. Energi Terkemuka:

Adalah menjadikan Kabupaten Berau sebagai pusat energy terkemuka Kalimantan Timur yang ditandai dengan tersedianya kebutuhan energy dengan



memanfaatkan secara optimal pada sumber energy yang tidak terbaharukan seperti gas alam, batubara; terbangunnya sumber energy alternative dengan memanfaatkan sumber energy terbaharukan tenaga surya, tenaga angin, air dan bioenergi serta tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan penghematan energi

4. Sejahtera:

Adalah wujud kehidupan masyarakat yang dicita-citakan dengan terpenuhinya semua kebutuhan batiniah dan lahiriah yang selaras, seimbang dan dinamis dalam tatanan pembangunan peradaban manusia seutuhnya.

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut sebagai cita-cita yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan, maka ditetapkan misi yang menggambarkan arah pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, terampil dan berakhlak mulia;
2. Membangun, mengembangkan dan meningkatkan kawasan sentra produksi pertanian dalam arti luas dalam menunjang ekowisata dan agribisnis;
3. Mewujudkan pemenuhan infrastuktur dasar untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang layak dan sejahtera ;
4. Mewujudkan perbaikan system subsidi, perlindungan social dan penanggulangan/pengentasan masyarakat miskin;
5. Mewujudkan pemberdayaan dan kemandirian kelembagaan masyarakat dengan pendekatan partisipatif;
6. Mewujudkan struktur ekonomi yang berdaya saing dan pro kerakyatan dengan konsep pembangunan berkelanjutan;
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Pembangunan Kabupaten Berau untuk lima tahun kedepan tidak lepas dari tuntutan dan tantangan yang diterjemahkan dalam visi, misi serta strategi Pembangunan Kabupaten Berau. Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut,



akan sangat ditentukan oleh komitmen dan kesepakatan bersama seluruh pelaku pembangunan, partisipasi masyarakat dan swasta serta adanya hubungan yang serasi dan kebersamaan antara Pemerintah Pusat, pemerintah Propinsi dan pemerintah Kabupaten/kota merupakan kunci sukses pembangunan di masa yang akan datang.

Pembangunan pada intinya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar lebih baik, dibandingkan dengan kondisi saat ini. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya perlu ditata dan dilakukan tahap demi tahap dan berkelanjutan. Dalam setiap tahapan perlu ditentukan arah dan kebijakan yang akan menjadi panduan gerak pembangunan ke depan.

Arah dan Kebijakan Pembangunan Kabupaten Berau sangat berkaitan dengan pembangunan manusia Kabupaten Berau yang sejahtera, baik sebagai subjek maupun objek pembangunan. Bobot pada pengembangan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan daya beli masyarakat akan menjadi dasar di kemudian hari untuk menyiapkan salah satu modal dasar pembangunan yaitu modal manusia.

Hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah pengembangan modal social, pembangunan mental aparat dan masyarakat, modal fisik, dan modal alam yang keseluruhannya merupakan faktor-faktor kritis bagi ketangguhan jangka panjang perekonomian suatu daerah.

Kebijakan pembangunan Kabupaten Berau tahun 2011 – 2015 secara garis besar diwarnai oleh pendekatan kewilayahan dan sektoral yang secara sinergis diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh pengelola Pembangunan.

Kebijakan pembangunan Kabupaten Berau tahun 2011 - 2015 yang telah mencanangkan dan melaksanakan 3 (tiga) Program prioritas sebagai Grand Strategi pembangunan yang meliputi ;

- o **Strategi Peningkatan Kapasitas**

Strategi yang diarahkan untuk mengembangkan kemampuan kapasitas aparatur dan ekonomi daerah agar dapat memanfaatkan sumberdaya lokal secara bijaksana dan berkelanjutan.



○ **Strategi Perluasan Kesempatan**

Strategi yang diarahkan untuk menciptakan keadaan ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang memungkinkan setiap anggota masyarakat memperoleh kesempatan dan hak-hak dasar serta hidup yang layak.

○ **Strategi Penataan Kemitraan**

Strategi yang diarahkan membangun dan mengembangkan hubungan kesetaraan perusahaan besar dan kecil, eksekutif dan legislatif, pemerintah dan swasta, kaya dan miskin, laki dan perempuan yang saling menguntungkan.

Sesuai RPJMD Kabupaten Berau tahun 2011 - 2015 secara umum kebijakan pembangunan Kabupaten Berau diarahkan kepada:

- Revitalisasi Perekonomian Daerah
- Pembangunan Sumber Daya Manusia
- Pembangunan Infrastruktur dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Pengembangan Wilayah
- Sosial Budaya
- Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan
- Pengembangan Hukum dan HAM serta Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa dengan Mengutamakan Kepentingan Publik.

Atas dasar hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Berau menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Berau untuk tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM melalui Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan.
 - a. Kebijakan Umum dibidang Pendidikan
 1. Revitalisasi Pendidikan.
 2. Meningkatkan Kualifikasi dan sertifikasi profesi guru
 3. Mengurangi angka buta aksara
 4. Meningkatkan pelaksanaan pendidikan luar sekolah (PLS), Pemuda dan Olah Raga.



- b. Kebijakan Umum dibidang Kesehatan
 - 1. Revitalisasi unit-unit pelayanan Kesehatan.
 - 2. Meningkatkan peran sumber daya kesehatan
 - 3. Peningkatan aksesibilitas, pemerataan keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
 - 4. Peningkatan penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil, bayi dan anak balita
 - 5. Peningkatan kewaspadaan dan pemberantasan penyakit menular.
- c. Kebijakan Umum dibidang Pembinaan Keagamaan
 - 1. Meningkatkan sumber daya manusia dibidang Keagamaan.
 - 2. Peningkatan dan pengembangan sarana peribadatan.
 - 3. Meningkatkan kerukunan antar dan intern umat beragama.
- 2. Pengembangan pertanian dalam arti luas
Kebijakan Umum Pembangunan :
 - 1. Revitalisasi infrastruktur pertanian dalam arti luas.
 - 2. Revitalisasi Penyuluh Pertanian dalam arti luas.
 - 3. Mendorong terjalannya pola kemitraan antara petani dan pengusaha dibidang pertanian dalam arti luas.
 - 4. Peningkatan intensifikasi pertanian dalam arti luas.
 - 5. Perluasan areal pertanian melalui ekstensifikasi pertanian dalam arti luas.
 - 6. Optimalisasi lahan pertanian dalam arti luas.
 - 7. Diversifikasi komoditi pertanian dalam arti luas.
- 3. Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur.
Kebijakan Umum Pembangunan :
 - 1. Pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana transportasi
 - 2. Peningkatan Pemanfaatan sumber daya air.
 - 3. Peningkatan sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman.



4. Peningkatan infrastruktur dasar pendidikan, kesehatan, sarana aparatur pemerintah dan prasarana pelayanan umum lainnya.
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui regulasi dan deregulasi bagi dunia usaha, penumbuhan kegiatan ekonomi kerakyatan, peningkatan peran pengusaha kecil menengah dan koperasi

Kebijakan Umum Pembangunan :

1. Pengaturan dalam hal pemberian perizinan bagi dunia usaha.
 2. Menata kembali peraturan – peraturan yang menjadi kendala dalam kegiatan investasi.
 3. Memprioritaskan bidang usaha yang menyentuh masyarakat golongan ekonomi kecil dan koperasi.
 4. Melibatkan pengusaha kecil dan koperasi dalam kegiatan investasi dunia usaha (kemitrausahaan)
 5. Peningkatan kualitas sumberdaya pengusaha kecil dan koperasi
5. Pemberdayaan lembaga sosial kemasyarakatan.

Kebijakan Umum Pembangunan :

1. Pemberdayakan organisasi keagamaan.
 2. Pemberdayakan lembaga adat
 3. Pemberdayaan Badan Perwakilan Kampung (BPK), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pengelola Program Pengembangan Kecamatan(PPK),
 4. Pemberdayaan organisasi wanita dan penyetaraan gender.
 5. Pemberdayaan organisasi kepemudaan
6. Perbaikan kualitas lingkungan hidup.

Kebijakan Umum Pembangunan :

1. Penataan kawasan lingkungan perkotaan dan pedesaan.
2. Mencegah terjadinya kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan.
3. Memulihkan kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang rusak.



4. Mempertahankan kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang masih dalam kondisi baik.
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
6. Mengembangkan sistem hukum yang dapat mencegah atau mengatasi pencemaran sumber daya air dan lingkungan.
7. Meningkatkan jaringan kerja sama dan tukar pengalaman dengan lembaga internasional dalam hal pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan hidup.
8. Penanggulangan bencana alam
7. Peningkatan, pengembangan subjek dan objek pariwisata serta pembinaan budaya lokal.

Kebijakan Umum Pembangunan :

1. Penataan Situs Peninggalan sejarah.
2. Penataan kawasan objek pariwisata
3. Penataan situs peninggalan syiar agama
4. Pembinaan budaya lokal
5. Peningkatan sumberdaya pariwisata
6. Peningkatan promosi pariwisata
8. Pengentasan kemiskinan

Kebijakan Umum Pembangunan :

1. Peningkatan pengentasan kemiskinan sandang, pangan dan papan.
2. Jaminan kesehatan keluarga miskin
3. Rehabilitasi sosial
4. Sertifikasi lahan pertanian dan lahan pekarangan bagi keluarga miskin
5. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja bagi keluarga miskin
6. Pemberian pelayanan gratis akte-akte dan kartu tanda penduduk bagi rumahtangga miskin
7. Pemberian beasiswa bagi anak keluarga miskin



8. Pemberdayaan lembaga usaha ekonomi pedesaan, kelompok usaha bersama.
9. Penataan dan perencanaan potensi daerah, pembinaan dan pengembangan aparatur penyelenggara pemerintah daerah serta pengendalian dan evaluasi Kebijakan Umum Pembangunan :
 1. Pembinaan dan pengembangan pegawai negeri sipil
 2. Penelitian dan pengembangan potensi daerah
 3. Pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan daerah

C. Prioritas Daerah

Prioritas Program Pembangunan Daerah sesuai dengan Prioritas dan Plafon Anggaran adalah sebagai berikut:

URUSAN WAJIB

1. Pendidikan

- Program Pendidikan Anak Usia Dini
- Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- Program Pendidikan Menengah
- Program Pendidikan Non Formal
- Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
- Program manajemen layanan pendidikan
- Program Penunjang Pendidikan
- Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

2. Kesehatan

- Program Obat dan Pembekalan Kesehatan
- Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- Program Pengawasan Obat dan Makanan
- Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- Program Pengembangan Lingkungan Sehat



- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu & Jaringannya
- Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya
- Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata
- Program Kemitraan Pelayanan Kesehatan
- Program Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak

3. Pekerjaan Umum

- Program Pembangunan Jalan & Jembatan
- Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
- Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
- Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan & Jembatan
- Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong
- Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
- Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan
- Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
- Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
- Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

4. Perumahan

- Program Pengembangan Perumahan
- Program Peningkatan Kesiagaan & Pencegahan Bahaya Kebakaran
- Program Pengelolaan areal Pemakaman



5. Tata Ruang

- Program Perencanaan Tata Ruang
- Program Pemanfaatan Ruang

6. Perencanaan Pembangunan

- Program Pengembangan Data/Informasi
- Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
- Program perencanaan pembangunan daerah
- Program perencanaan pembangunan ekonomi
- Program perencanaan sosial budaya
- Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

7. Perhubungan

- Program Pembangunan Prasarana & Fasilitas Perhubungan
- Program Rehabilitasi & Pemeliharaan Prasarana & Fasilitas LLAJ
- Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
- Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
- Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
- Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
- Program Pembangunan Prasarana & Fasilitas Perhubungan

8. Lingkungan Hidup

- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup
- Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

9. Pertanahan

- Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah



10. Kependudukan dan Catatan Sipil

- Program penataan administrasi kependudukan

11. Pemberdayaan Perempuan

- Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
- Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- Program Keluarga Berencana

13. Sosial

- Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
- Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
- Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit sosial lainnya)
- Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

14. Tenaga Kerja

- Program Peningkatan Kesempatan Tenaga Kerja
- Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
- Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

16. Penanaman Modal

- Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

17. Budaya

- Program Pengelolaan Keragaman Budaya



18. Pemuda dan Olah Raga

- Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
- Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- Program Peningkatan dan Kenyamanan Lingkungan
- Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
- Program Pendidikan Politik Masyarakat
- Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

20. Pemerintahan Umum

- Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH
- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
- Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
- Program penataan peraturan perundang-undangan
- Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
- Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
- Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
- Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

21. Kepegawaian

- Program Pendidikan Kedinasan
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur



22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
- Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
- Program Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
- Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- Program Pengembangan Kecamatan

23. Statistik

- Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

24. Kearsipan

- Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
- Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokument/Arsip Daerah
- Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

25. Komunikasi dan Informasi

- Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
- Program kerja sama informasi dengan mass media

URUSAN PILIHAN

1. Pertanian

- Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian
- Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
- Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
- Program Peningkatan Produksi Pertanian
- Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian
- Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak
- Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan



- Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

2. Kehutanan

- Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
- Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
- Program Pembinaan Dan Penertiban industri Hasil Hutan
- Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

3. Energi dan Sumber Daya Mineral

- Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
- Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan
- Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

4. Pariwisata

- Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- Program Pengembangan Kemitraan

5. Kelautan dan Perikanan

- Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
- Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan
- Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan
- Program Pengembangan Budidaya Perikanan
- Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
- Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut Air Payau dan Tawar

6. Perdagangan

- Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
- Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor



- Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan

7. Perindustrian

- Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
- Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

8. Transmigrasi

- Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi